

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR : B-3/TI.02.00/K.SN-03/09/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 001/TI.02.00/K.SN-03/01/2025**

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Bone yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bone; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bone.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5838);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 5. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
11. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 001/TI.02.00/K.SN-03/01/2025 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025.
- KESATU

:

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA

:

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi Sebagai berikut:

 - 1) Pembina bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan laporan pelayanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

- 3) Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID Bertugas
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk Bawaslu Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 1 September 2025

KETUA,



ALWI, S.E., S.H

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Sekertariat Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Masing-masing besangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR B-3/TI.02.00/K.SN-03/09/2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR
001/TI.02.00/K.SN-03/01/2025 TENTANG TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	ALWI, S.E, S.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE	PEMBINA PPID
2	Dr. NUR ALIM. SH.,MH.Kes	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	TIM PERTIMBANGAN PPID
3	Dr. KAMRIDAH. S.Pd.I.,M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	
4	ROHZALI PUTRA BADARUDDIN.SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	
5	MUHAMMAD ARIS, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	
6	VIVIN SANJAYA, M.H	Plt.KEPALA SEKRETARIAT	ATASAN PPID
7	VIVIN SANJAYA, M.H	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATIN	PEJABAT PPID (Ex-Officio)
8	LUTFI FACHRULLAH, S.Kom	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	MUH. CHAERIL AMRY SYAM, S.Kom	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER	
10	ZULFADLI, S.Sos	AHLI PERTAMA – PRANATA HUMAS	
11	ERNA SRI ARTINA, S.H	AHLI PERTAMA – PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
12	ARIF RAKHMAT, S.H	AHLI PERTAMA – PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
13	MUH. DENY SYAFEI YULIA DWI PUTRA, S.H	AHLI PERTAMA – PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
14	DEVI LEMI, S.Pd	AHLI PERTAMA – ARSIPARIS	
15	FARAHNA ABDULLAH, S. Pd, M. Pd	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
16	AMRIANAH, S.K.M	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	
17	MUHAMMAD SYAKIR, S. Pd	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
18	HERAWATY KHARNHILA, S.PD	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA,



ALWI, S.E., S.H